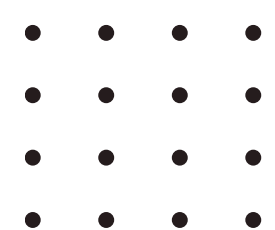


# LAPORAN EVALUASI TRIWULAN IV TAHUN 2025



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN





## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Evaluasi Kinerja Instansi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Tahun IV Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Laporan ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan di masa datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Laporan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Tahun 2025 dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyusunannya.

Malili, 31 Desember 2025  
Kepala Dinas,

**DRS. H. BAHRI SULI, MM**

Pangkat Pembina Utama Madya  
NIP. 196606201986031007

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Maksud dan Tujuan .....	1
C.    Gambaran Umum Organisasi.....	2
BAB II     PERENCANAAN KINERJA.....	6
A.    Rencana Strategis .....	6
B.    Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	12
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
3.1   Capaian Kinerja DPKPP Kab. Luwu Timur Triwulan III.....	13
3.2   Analisis Capaian Kinerja.....	14
3.3   Realisasi Anggaran.....	60
BAB IV    PENUTUP .....	64

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun laporan setiap pertriwulan yang akan menjadi media pertanggungjawaban organisasi. Laporan ini merupakan bahan evaluasi terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam setiap pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan juga berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

Laporan kinerja triwulan IV Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Luwu Timur adalah perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada DPKPP Kabupaten Luwu Timur atas penggunaan anggaran.

#### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja triwulan IV DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebagai penjabaran visi dan misi yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

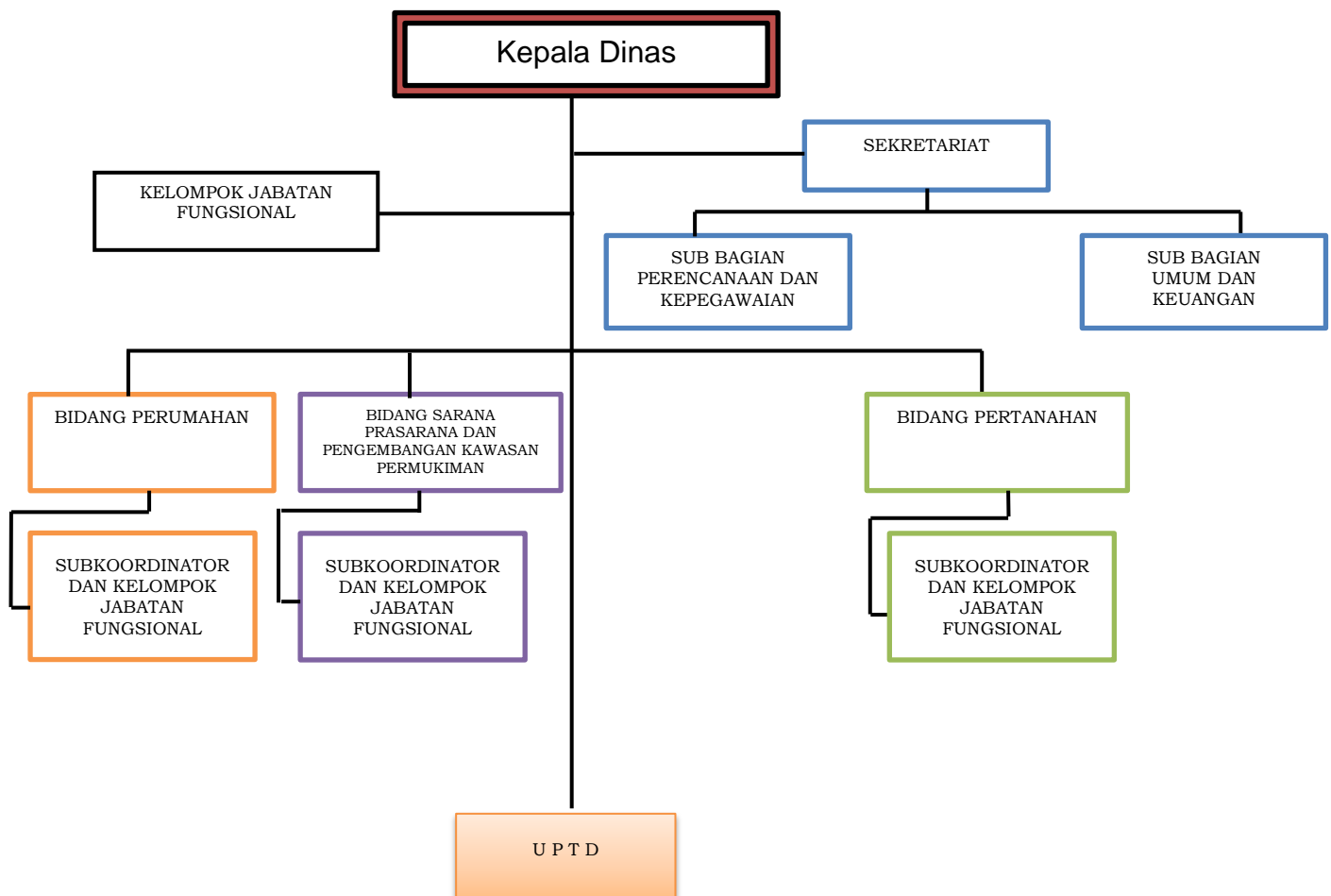
Tujuan Penyusunan laporan kinerja triwulan IV DPKPP Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi DPKPP Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan kinerjanya.

## C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

### 1. Struktur Organisasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, seperti termuat pada bagan di bawah ini sebagai berikut

#### STRUKTUR KELEMBAGAAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR



## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok DPKPP Kabuapten Luwu Timur Sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi secara singkat, fungsi pokok dari DPKPP Kabuapten Luwu Timur, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perumahan;
- Merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- Merumuskan kebijakan teknis di pertanahan;
- Merumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- Melaksanakan administrasi Dinas; dan
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

## 3. Sumber Daya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang ada di DPKPP Kabupaten Luwu Timur sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di DPKPP Kabupaten Luwu Timur dapat berupa sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang ada. Sumber daya manusia berupa tenaga teknis yang tetap dilingkup DPKPP Kabupaten Luwu Timur dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada tahun 2025 dapat dilihat distribusinya sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Komposisi SDM Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025**

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur	32	19	51

Dari tabel 1.1 diatas digambarkan bahwa komposisi sumber daya manusia pada akhir tahun 2025 sebanyak 51 orang, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 32 orang dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 19 orang.

**Tabel 2**  
**Komposisi SDM**  
**Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025**

No	Unit Kerja	Jenjang Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	D3	D2	D1	SMA	
1	2	3	3	4	5	6	7		9
1.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur	1	3	37	-	-	1	9	51

Dari tabel 1.2 diatas digambarkan bahwa jumlah Pegawai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur pada triwulan IV tahun 2025, berdasarkan jenjang pendidikan, S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 3 orang, S1 Sebanyak 37 orang, D1 sebanyak 1 orang dan SMA sebanyak 9 orang.

**TABEL 3**  
**Komposisi SDM**  
**Berdasarkan Jenjang Eselon Tahun 2025**

No	Jenjang Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	II a	1	-	1
2	III a	1	-	1
3	III b	3	-	3
4	IV a	-	2	2
<b>Total</b>		5	2	7

Dari tabel 1.3 komposisi sumber daya manusia berdasarkan jenjang eselon sebanyak 7 orang, terdiri dari eselon II/a sebanyak 1 orang, eselon III/a sebanyak 1 orang eselon III/b sebanyak 3 orang dan eselon IV/a sebanyak 2 orang.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

##### **1. Visi**

Sesuai dengan Visi Luwu Timur yaitu **"LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA"**.

##### **2. Misi**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka di perlukan misi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029 melaksanakan misi ke-3 (M3), Ke-5 (M5) yaitu :

1. Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan (M3);
2. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital (M5).

##### **3. Tujuan**

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan sampai 5 (lima) tahun. Adapun Tujuan dari DPKPP Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni, terjangkau dan layanan pertanahan berkelanjutan;

##### **4. Sasaran**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur dalam kurun waktu tertentu/ tahunan, lebih pendek dari tujuan, dapat dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran DPKPP Kabupaten Luwu Timur yang akan dicapai :

1. Meningkatnya penanganan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman serta tata kelola pertanahan;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

Tabel 4

Sasaran dan Indikator Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur

TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2025
TUJUAN 1 : Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni, terjangkau dan layanan pertanahan berkelanjutan	Persentase pemenuhan infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan pemanfaatan tanah milik Pemerintahan Daerah	
SASARAN 1: Meningkatnya penanganan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman serta tata kelola pertanahan	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	3,14
	Persentase kawasan layak huni	99,945
	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	100
SASARAN 3: Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	<i>Nilai Akip Perangkat Daerah</i>	71,85

## 5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi, dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan IKU sebagai berikut :

**Tabel 5**

**Indikator Kinerja Utama**

**Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya penanganan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman serta tata kelola pertanahan	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	%	(Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani / Jumlah Total Unit RTLH Kabupaten) X 100%	Laporan Kinerja Bidang Perumahan Dan Bidang Sarana Prasaranan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan Dan Bidang Sarana Prasaranan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman
		Persentase Kawasan Layak Huni	%	(Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan = Luas Kota Kumuh (Pusat Provinsi Kabupaten/Luas Wilayah Kota Kumuh (Pusat Provinsi Kabupaten)) X 100%  Persentase Kawasan Tidak Kumuh Perkotaan = 100% - Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan	Laporan Kinerja Bidang Perumahan Dan Bidang Sarana Prasaranan Dan Pengembangan	Bidang Perumahan Dan Bidang Sarana Prasaranan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					an Kawasan Permukiman	
2	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Persentase Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah	%	Luas Tanah Yang Dimanfaatkan (Ha) Tahun N / Luasan Tanah Yang Menjadi Aset Pemerintah Daerah(Ha) X 100%	Laporan Bidang Pertanahan	Bidang Pertanahan

## 6. Program

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025**  
**DPKPP Kabupaten Luwu Timur**

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
<p>SASARAN 1:</p> <p>Meningkatnya penanganan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman serta tata kelola pertanahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Perumahan</li> <li>2. Kawasan Permukiman</li> <li>3. Peningkatan Prasarana dan Utilitas Umum (PSU)</li> <li>4. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</li> <li>5. Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</li> <li>6. Pengelolaan Tanah Kosong</li> <li>7. Pengelolaan Izin Membuka Tanah</li> <li>8. Penatagunaan Tanah</li> </ol>
<p>SASARAN 2:</p> <p>Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</p>	<p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p>

## **B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan Bupati, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2025, berisi penjabaran dari upaya pencapaian tujuan, sasaran dan indikatornya. Pada Triwulan IV Tahun 2025. Sasaran, indikator, target kinerja Program disajikan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) Atas Perjanjian Kinerja (terlampir).

:

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas capaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu triwulan yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan pada target triwulan IV. Dalam bab ini juga akan disajikan realisasi keuangan yang memuat realisasi anggaran Triwulan IV Tahun 2025.

#### 3.1 Capaian Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV

##### a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja triwulan IV Tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Dinas dengan Bupati Luwu Timur.

Adapun capaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 7**

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis Triwulan IV Tahun 2025**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya penanganan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman serta tata kelola pertanahan	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	3,14	3,29	104,777
	Persentase kawasan layak huni	%	99,946	99,946	100,000
	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,000
Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,85	0,00	-



### 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program.

#### Sasaran Strategis I

Meningkatnya penanganan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman serta tata kelola pertanahan

**Tabel 8**

**Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya penanganan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman serta tata kelola pertanahan	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	3,14	3,29	104,777
	Persentase kawasan layak huni	%	99,946	99,946	100,000
	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,000

#### 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran I memiliki 3 indikator yaitu : Persentase penanganan rumah tidak layak huni.

##### ➤ Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : “((Jumlah seluruh rumah tidak layak huni (RTLH) – Jumlah RTLH yang ditangani)/Jumlah seluruh rumah) x 100%”. Indikator sasaran ini, dengan target 31,4 telah terealisasi 3,29 capaian 104,77. Realisasi yang diperoleh merupakan hasil pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni yang

disinkronkan dengan beberapa kegiatan dan program, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang beririsan dengan DPKPP Kabupaten Luwu Timur, yaitu Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan P3A. Salah satu strategi dalam penurunan jumlah rumah tidak layak huni adalah peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanggulangan dan pemutakhiran data RTLH pada aplikasi e-RTLH, sehingga penanganan RTLH dapat tercapai dengan tepat sasaran dan maksimal. Mengacu kepada IKU Kepala Daerah, terkait pengukuran indeks kualitas infrastruktur daerah, maka DPKPP Kabupaten Luwu Timur beserta stakeholder lainnya mempunyai tugas untuk mencapai target tersebut, salah satunya peningkatan rumah tidak layak huni, untuk memperoleh nilai rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau.

➤ **Persentase Kawasan Layak Huni**

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : “ (Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan = Luas Kota Kumuh (Pusat Provinsi Kabupaten/Luas Wilayah Kota Kumuh (Pusat Provinsi Kabupaten)) X 100%”, kemudian Persentase Kawasan Tidak Kumuh Perkotaan = 100% - Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan. Indikator sasaran ini, dengan target 99,946 %, telah terealisasi 99,946 % capaian 100%. Realisasi yang diperoleh merupakan hasil pelaksanaan penanganan dan pencegahan kawasan kumuh kota melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Penanganan kawasan kumuh untuk meningkatkan kawasan layak huni merupakan salah satu instrument untuk mengukur IKU Kepala Daerah terkait Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah.

Rencana aksi untuk mendukung sasaran I adalah peningkatan kapasitas ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penyediaan hunian, peningkatan kualitas sarana, prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman.

❖ Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran I yaitu :

✚ Program Pengembangan Perumahan :

1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
3. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah

Khusus

#### 4. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

##### ✚ Program Kawasan Permukiman

1. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
2. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
3. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

##### ✚ Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

#### ❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian indikator Sasaran I, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu:

- ✚ Tidak terlaksananya karena tidak ada SK penetapan status bencana;
- ✚ Untuk penatausahaan rumah susun dan rumah khusus masih ada penghuni yang tidak sesuai dengan kriteria penghunian yang ditetapkan
- ✚ Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi dari perangkat daerah;
- ✚ Belum meratanya pemahaman terkait penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan kawasan kumuh di beberapa stakeholder;
- ✚ Telah banyak upaya penanganan rumah tidak layak huni yang telah dilakukan, namun belum terpetakan dengan baik.

#### ❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- ✚ Tetap menyiapkan anggaran untuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota
- ✚ Melakukan penertiban penghuni yang tidak memenuhi kriteria
- ✚ Mengusulkan penggunaan dana desa selain untuk penanganan rumah tidak layak huni juga untuk kegiatan pencegahan dan penanganan kawasan kumuh;
- ✚ Melakukan pemutakhiran data dan informasi rumah tidak layak huni;
- ✚ Melakukan sosialisasi terkait rencana pencegahan dan peningkatan kualitas

perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

- Melakukan pemetaan terkait upaya pencegahan dan penanganan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh di bawah 10 Ha;

#### ❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran strategis DPKPP Kab. Luwu Timur, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Terkait perbaikan rumah tidak layak huni, dilakukan pengusulan melalui APBN, CSR dan BAZNAS. Selain itu melalui kelompok Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Permukiman, diusulkan untuk bantuan prasarana sarana utilitas perumahan skala besar.

#### ❖ Efisiensi Sumber Daya

- Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi maupun pengetahuan tentang SPM, maka dapat terfasilitasi dengan adanya website resmi DPKPP Kabupaten Luwu Timur sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait kebencanaan dari media. Dan penyebarluasan informasi kebencanaan juga dilakukan melalui Media Sosial melalui FB, IG &. Yang merupakan PD yang beririsan dengan DPKPP terkait urusan penanganan SPM ini

## 2. Perbandingan antara target dan realisasi triwulan IV Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 9

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Sasaran I	Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak						Target Tahun 2025 (%)
Indikator Kinerja Sasaran	Triwulan Sebelumnya			Triwulan IV			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase penanganan	0	0	0	3,14	3,29	104,77	3,14



Sasaran I	Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak						Target Tahun 2025 (%)
Indikator Kinerja Sasaran	Triwulan Sebelumnya			Triwulan IV			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
rumah tidak layak huni (1)							
Persentase kawasan layak huni (2)	0	0	0	99,946	99,946	100	99,946
Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	0	0	0	100	100	100	100



Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan untuk capaian triwulan IV, capaian indikator-indikator bernilai positif, bahkan indikator pertama capainnya melebihi target yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan adanya penanganan RTLH yang melebihi perencanaan awal baik dari sisi jumlah unit maupun cakupan wilayah, optimalisasi pelaksanaan program dengan percepatan pelaksanaan kegiatan di lapangan, serta adanya dukungan program lintas sektor atau sumber pendaanaan lain.

### 3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV dengan Target Jangka Menengah

Capaian pada triwulan IV, dapat dijelaskan penentuan target pada sasaran I pada masing-masing indikator jika dibandingkan dengan target jangka menengah adalah :

- ✚ Persentase penanganan rumah tidak layak huni, target ditetapkan mengacu pada realisasi yang diperoleh pada tahun 2024. Banyak faktor yang mendukung tercapainya indikator, diantaranya adalah kolaborasi dengan beberapa stake holder antara lain PUPR terkait layanan keciptakarya air minum, sanitasi, drainase, penerangan jalan, Dinas Lingkungan Hidup program persampahan,

Dinas Kesehatan pada program pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pelaksanaan kesehatan bersumber daya masyarakat kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada program penanggulangan bencana

-  Persentase kawasan layak huni, target yang ditetapkan mengacu pada target pada jangka menengah tahun 2025, yang salah satu variable yang mendukung untuk pemenuhan indeks kualitas layanan infrastruktur.
-  Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah, indikator ini memiliki persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah, dengan formulasi “ luasan tanah yang dimanfaatkan/luasan tanah yang menjadi aset Pemerintah Daerah) x 100%. Target indikator 100%. Rencana aksi untuk mendukung sasaran ini adalah perencanaan pengadaan tanah, identifikasi dan verifikasi tanah aset pemda yang akan dilakukan pengaman dan sertifikasi, penetapan izin lokasi dan penyelesaian kasus tanah

#### 4. Perbandingan dengan Target Nasional (Rumah Layak Huni)

Pada triwulan IV berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Program 3 Juta Rumah s.d. Minggu ke-2 November 2025 (**14 November 2025**) mencapai sebanyak **562.929 unit atau 18,76%**. Capaian Program 3 Juta Rumah sebanyak 562.929 unit ini terdiri atas.

- a. Pembangunan rumah baru (PB) sebanyak 469.563 unit atau 18,98% dari target sebanyak 2.474.471 unit. Capaian terdiri atas Negara (Rumah Susun sebanyak 240 unit, Rumah Khusus sebanyak 416 unit, dan APBD Kabupaten/Kota sebanyak 11.987 unit), Pengembang (FLPP sebanyak 221.395 unit, Rumah Komersial memanfaatkan PPN DTP sebanyak 15.328 unit, Pelonggaran GWM BI sebanyak 60.914 unit), Swadaya sebanyak 158.705 unit dan Gotong Royong (CSR) sebanyak 578 unit.
- b. Peningkatan kualitas (PK) sebanyak 93.366 unit atau 17,77% dari target sebanyak 525.529 unit. Capaian terdiri atas Negara (APBD Kabupaten/Kota sebanyak 49.613 unit), Pengembang (Pembiayaan Mikro PT SMF dan PNM sebanyak 36.451 unit), Swadaya (PBG) sebanyak 786 unit dan Gotong Royong (CSR) sebanyak 6.516 unit.

## 5. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran I

### Program Pengembangan Perumahan

Pengembangan perumahan merupakan proses perencanaan, pembangunan dan pengelolaan area hunian yang bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat. Sasaran Program ini adalah meningkatnya capaian pengembangan perumahan. Tujuan yang akan dicapai peningkatan akses terhadap tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Indikator program Pengembangan Perumahan Tahun 2025 terdiri dari 2 indikator yaitu :

- a. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni. Target Triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, capaian 100%
- b. Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. Target triwulan IV untuk rencana aksi Adalah 25%.

Pada tahun 2025, Program Pengembangan Perumahan didukung oleh 3 kegiatan utama yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal yaitu:

- i. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota adalah pelayanan informasi tentang penanganan bencana alam pra dan pasca bencana, yang merupakan upaya penting untuk memastikan bahwa masyarakat yang terdampak bencana mendapatkan tempat tinggal yang layak. Indikator kegiatan adalah jumlah dokumen hasil pendataan identifikasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota yang akan dibangun dan direhabilitasi serta jumlah dokumen hasil pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus yang dimanfaatkan sebagai bahan informasi perumahan. Untuk indikator ini yang ditargetkan dari rencana aksi adalah 25% terealisasi baru 10%. Sedangkan untuk rencana kerja ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :
  - a. Subkegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah dokumen data rumah sewa milik masyarakat, rumah susun, dan rumah khusus. Target subkegiatan ini adalah 30% dan terealisasi 30% dengan capaian rencana

aksi 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi dan penandatanganan perjanjian penghunian rumah khusus nelayan di Desa Mabonta Kec. Burau dan monitoring pemanfaatan rumah deret khusus nelayan di Desa Balo-Balo Kec. Wotu.

- b. Subkegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana kabupaten/kota. Target subkegiatan ini adalah 50% dan terealisasi 50% sehingga capaian rencana aksi 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan berupa seminar pendahuluan dan seminar akhir dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- ii. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan kondisi permukiman, menyediakan hunian yang layak, dan memastikan masyarakat terdampak bencana atau relokasi program dapat tinggal di tempat yang aman, sehat dan berketahanan. Program ini dilakukan setelah proses pendataan, verifikasi dan penerimaan bantuan. Indikator kegiatan ini adalah persentase rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang tertangani. Pencapaian rencana kerja belum terealisasi karena tidak adanya SK penetapan status bencana, namun tetap dipersiapkan anggarannya sehingga capaian kinerjanya 100%. Pencapaian target pada kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :
  - a. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, indikatornya adalah jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi. Realisasi dan rencana aksi dari subkegiatan ini adalah 100%.
  - b. Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana, indikatornya adalah jumlah rumah korban bencana yang dibangun. Realisasi dan rencana aksi dari subkegiatan ini adalah 100%.
  - c. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota, indikatornya jumlah rumah khusus beserta PSU bagi korban relokasi program Kabupaten/Kota yang dibangun. Realisasi dan rencana aksi dari subkegiatan ini adalah 100%. Untuk kegiatan dan subkegiatan pada point ii, terlaksana jika ada bencana yang



terjadi, yang disahkan melalui Surat Keputusan Bupati.

- iii. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus merupakan upaya untuk memastikan keberlanjutan penghunian, pemeliharaan bangunan, serta pengelolaan lingkungan yang aman, sehat, dan tertib bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau kelompok tertentu yang menempati rumah susun atau rumah khusus. Pembinaan dilaksanakan secara rutin kepada pengelola, penghuni, serta pemangku kepentingan lain agar pengelolaan hunian berjalan sesuai standar teknis dan ketentuan perumahan. Indikator kegiatan ini adalah persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola. Untuk indikator ini yang ditargetkan dari rencana aksi adalah 25% dengan pencapaian rencana kerja telah terealisasi 100%. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

- a. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Indikator subkegiatan ini adalah jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus. Target subkegiatan ini adalah 30% dan terealisasi 30% dengan capaian rencana aksi 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan berupa penataan penghunian rumah susun sumasang dan pengelolaan rumah susun PNS, pemeliharaan rumah susun PNS dan rumah susun sumasang, serta penyambungan kwh pada rumah susun sumasang.

- IV. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur, menilai, dan menyetujui rencana pembangunan perumahan oleh pengembang, masyarakat, atau badan usaha lainnya. Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap pembangunan perumahan sesuai tata ruang, memnuhi standar teknis, menyediakan PSU yang memadai, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan lingkungan. Indikator kegiatan ini adalah persentase pengembang perumahan yang difasiitasi. Untuk indikator ini yang ditargetkan dari rencana aksi adalah 25% dengan realisasi kinerja 100%. Pencapaian target pada kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan aktifitas pada subkegiatan ini adalah koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait dengan pengendalian pembangunan

dan pengembangan perumahan seperti PUPR, DLH, PTSP dan kantor Pertanahan, dengan memberikan masukan atau pertimbangan teknis terkait rencana tata ruang dan standar teknis sesuai kewenangan urusan perumahan. Indikator subkegiatan ini adalah Jumlah kegiatan pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi. Capaian 100% untuk target kinerja karena ditargetkan masing-masing 1 dokumen setiap triwulan dan 100% untuk rencana aksi. Berikut tabel capaian program Pengembangan Perumahan

Tabel 10

Capaian Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan Program Pengembangan

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN IV				REALISASI TRIWULAN IV				CAPAIAN			
1	2	3	4				5				6			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	100
	Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	100
<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	Persentase daerah rawan bencana yang telah dilakukan identifikasi (%)	18	-	-	-	18	-	-	-	18	-	-	-	100
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	*Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN IV				REALISASI TRIWULAN IV				CAPAIAN			
1	2	3	4				5				6			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	Persentase rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota yang direhabilitasi dan dibangun (%)	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	100
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	*Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	*Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota											-	-	-	-
<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola (%)	100	25	50	75	100	25	50	75	100	100	100	100	100
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	Persentase pengembang perumahan yang difasilitasi (%)	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN IV				REALISASI TRIWULAN IV				CAPAIAN			
1	2	3	4				5				6			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Perumahan	Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (laporan)													
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	70,25	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	100
<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	Jumlah seluruh lingkungan perumahan (Lingkungan)	11	-	-	-	11	-	-	-	11	-	-	-	100
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	*Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)	11	-	-	-	11	-	-	-	11	-	-	-	100

### Program Kawasan Permukiman

Program kawasan permukiman merupakan aksi dan inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk, memperbaiki infrastruktur dan mengembangkan lingkungan yang berkelanjutan. Sasaran program ini adalah meningkatnya rumah layak huni dan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani. Indikator program tahun 2025 ada 2 yaitu :

- a. Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani, dengan formulasi luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani dibagi luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha. Target triwulan IV adalah 25% dan realisasi hanya 10%, sehingga capaian hanya 40%.

Pada tahun 2025, Program Kawasan Permukiman didukung oleh 3 kegiatan utama yaitu:

- Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman adalah proses yang diatur oleh peraturan pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan rencana tata ruang, standar teknis dan persyaratan lingkungan yang berlaku. Indikator kegiatan adalah Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi. Aktifitas pada kegiatan ini adalah penyusunan dokumen dari hasil koordinasi dengan Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD), dengan menghasilkan pertimbangan teknis kesesuaian kegiatan dengan pemanfaatan ruang , substansi standar teknis pemenuhan upaya pengelolaan lingkungan dan pertimbangan teknis lainnya yang dibutuhkan pada proses pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. Pencapaian rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target pada kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

- a. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan permukiman, aktifitas subkegiatan ini adalah kegiatan koordinasi teknis rencana pembangunan, penyusunan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Indikator subkegiatan ini adalah

jumlah kegiatan pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi, terealisasi 25% dengan capaian rencana aksi 100% dan rencana kerja 100%

- Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha merupakan salah satu kegiatan dalam upaya mengatasi masalah permukiman yang tidak layak huni dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aktifitas kegiatan ini adalah penyusunan dokumen yang dijadikan acuan dalam melaksanakan penyelesaian masalah perumahan dan permukiman kumuh. Indikator, Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi. Indikator kegiatan ini adalah jumlah kegiatan pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi. Pencapaian target pada kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :
  - a. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP adalah review Renacana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan penyusunan dokumen Rencana Tata Letak Bangunan (RTLb), dengan indikator jumlah dokumen kebijakan bidang PKP yang tersusun/terreview/terlegalisasi.
- Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha merupakan salah satu kegiatan dalam upaya mengatasi masalah perumahan yang tidak layak huni dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aktifitas kegiatan ini berfokus pada perbaikan infrstruktur, sanitasi, kesehatan dan lingkungan, yang merupakan perwujudan untuk pencegahan kawasan kumuh dan perolehan rumah layak huni. Indikator pada kegiatan ini ada 2 yaitu :
  - Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dengan formulasi “jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu”.
  - Luas penanganan infrastruktur kawasan kumuh (Ha), aktifitas untuk memperoleh indikator ini adalah penanganan dan pencegahan kawasan kumuh dengan kegiatan pembangunan dan peningkatan.



Untuk penanganan ini tidak mencapai target hal ini dikarenakan ada beberapa delinasi yang tidak termasuk pada koordinat kumuh.

Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

- a. Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, aktifitas pada kegiatan ini adalah mengidentifikasi rumah tidak layak huni dan melakukan penanganan dengan berkoordinasi dengan aparat Desa sebagai pelaksana bedah rumah yang dilaksanakan. Untuk indikator ini melebihi dari target yang ditentukan karena ada 20 unit dari APBN dan BAZNAS 3 unit.
- b. Subkegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, aktifitas pada kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan fisik dan pemeliharaan untuk prasarana yang termasuk dalam kawasan kumuh dan yang merupakan aset DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Indikator, luas permukiman yang dipugar. Berikut tabel capaian program Kawasan Permukiman,

[illegible]

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN IV				REALISASI TRIWULAN IV				CAPAIAN			
1	2	3	4				5				6			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	105	-	-	2	103	-	-	2	103	-	-	100	100
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	*Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	5	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	100
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	70,25	-	-	-	70,25	-	-	-	100	-	-	-	142,35
<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	Jumlah seluruh lingkungan perumahan (Lingkungan)	11	-	-	-	11	-	-	-	11	-	-	-	100
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	*Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)	11	-	-	-	11	-	-	-	11	-	-	-	100

### **Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum**

Program ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas perumahan dan memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap prasarana, sarana dan utilitas dasar yang memadai. Sasaran program ini adalah terlaksananya peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum PSU. Indikator, Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dengan formulasi jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu dikali 100. Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

**i. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** adalah bertujuan untuk menyediakan infrastruktur dasar dan fasilitas yang diperlukan untuk menyediakan infrastruktur dasar dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kehidupan di lingkungan perumahan. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

- a. Subkegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan fisik dan pemeliharaan untuk prasarana, sarana dan utilitas yang termasuk dalam kawasan kumuh dan yang merupakan aset DPKPP Kabupaten Luwu Timur, yang dimulai dari penyusunan perencanaan ***Detail Engineering Design***, pembangunan dan pengawasan. Indikator Jumlah lingkungan perumahan yang didukung PSU.

Indikator persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah, dengan formulasi “ luasan tanah yang dimanfaatkan/luasan tanah yang menjadi aset Pemerintah Daerah) x 100%. Target indikator Rencana aksi untuk mendukung sasaran II adalah perencanaan pengadaan tanah, identifikasi dan verifikasi tanah aset pemda yang akan dilakukan pengamanan dan sertifikasi, penetapan izin lokasi dan penyelesaian kasus tanah.

❖ Program dan Kegiatan yang mendukung indikator yaitu :

✚ Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

✚ Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

1. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong

✚ Program Pengelolaan Tanah Kosong

1. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong

✚ Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

1. Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah

✚ Program Penatagunaan Tanah

1. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- ✚ Kurangnya sosialisasi terkait pelayanan tanah;
- ✚ Minimnya kualitas SDM pertanahan;
- ✚ Kurang optimalnya dokumentasi administrasi tanah.

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- ✚ Melakukan sosialisasi melalui media social dan melalui papan informasi publik;
- ✚ Memaksimalkan koordinasi lintas perangkat daerah, maupun instansi vertical Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, terkait pelaksanaan

program/kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian pelayanan pertanahan.

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu:

- ✚ Efisiensi anggaran yaitu persertifikatan tanah warga dan tanah rumah ibadah, dimasukkan ke program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, dengan pembebasan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang merupakan syarat untuk persertifikatan gratis.

❖ Efisiensi Sumber Daya

Dalam pencapaian sasaran 2, dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya yaitu:

- ✚ Pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi pelayanan pertanahan;
- ✚ Komunikasi yang aktif dengan SDM yang ada pada kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, untuk percepatan pelayanan urusan pertanahan

## 2. Perbandingan antara target dan realisasi triwulan IV Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 13

Perbandingan Target Realisasi Triwulan IV Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran	Triwulan Sebelumnya			Triwulan IV			Target 2025
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	0	0	0	100	100	100	100%

Berdasarkan tabel di atas dicapai untuk indikator ini tercapai 100%, kondisi ini didukung karena variable-variabel yang merupakan pendukung dari program-program tercapai 100%.

### 3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV dengan Target Jangka Menengah

Belum ada capaian pada triwulan IV, dapat dijelaskan penentuan target pada sasaran II jika dibandingkan dengan target jangka menengah adalah sama.

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan IV	Rata-rata realisasi sampai dengan Tahun 2025	Target Akhir Renstra
1	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	100	100	100



#### 4. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Indikator

##### Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini merujuk pada proses penyelesaian konflik atau perselisihan yang terjadi terkait kepemilikan atau penggunaan lahan garapan di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Indikator, persentase penyelesaian kasus tanah Negara dengan formulasi jumlah kasus yang ditangani dibagi jumlah kasus yang terdaftar kali 100%. Target triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%.

Pada tahun 2025, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan didukung 1 kegiatan :

- i. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan fasilitasi penyelesaian kasus. Indikator jumlah kasus terdaftar. Target triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja 100% dengan 1 laporan dan 1 untuk realisasi, sehingga capaian 100%. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :
  - a. Subkegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan koordinasi dan rapat-rapat bersama stakeholder yang terkait dalam memfasilitasi penyelesaian kasus tanah yang bersinggungan dengan aset Pemda yang dilaporkan. Target triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja 100% dengan 1 laporan dan 1 untuk realisasi, sehingga capaian 100%, yaitu permohonan pengembalian hak-hak masyarakat yang diklaim oleh PTPN (Persero) unit Kebun Malili dan penyamaan persepsi dan pandangan terhadap wilayah konsesi/kontrak Karya/IUP – K PT.Vale Ind, Tbk yang diantaranya masuk tercatat sebagai aset tanah Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur yang akan disertifikatkan serta rencana pelepasan HGB PT. Vale Ind, Tbk disekitar area Kantor Camat Nuha Desa Sorowako.

Tabel 15

Capaian Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan Indikator ketiga

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN IV				REALISASI TRIWULAN IV				CAPAIAN			
1	2	3	4				5				6			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan yang belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi (%)	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	100
<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kasus yang terdaftar (Kasus)	3	-	1	1	1	-	1	1	1	-	100	100	100
Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	3	-	1	1	1	-	1	1	1	-	100	100	100
<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	100	-	-	-	23	-	-	-	23	-	-	-	100

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN IV				REALISASI TRIWULAN IV				CAPAIAN			
1	2	3	4				5				6			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Luas lahan yang dibebaskan pada tahun n (10000 m2)	29673	-	-	-	29673	-	-	-	6.802	-	-	-	22,92
Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen)	3	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	100	100
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	Persentase tanah kosong yang dikelola (%)	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	100
<b>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>	Jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi (Bidang)	10	-	-	10	-	-	-	10	-	-	-	100	-
Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	*Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. (Laporan)	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	Persentase pengelolaan izin membuka tanah (%)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>	Jumlah permohonan izin	3	-	1	1	1	-	1	1	1	-	100	100	100

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN IV				REALISASI TRIWULAN IV				CAPAIAN			
1	2	3	4				5				6			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	lokasi yang terdaftar (Izin)													
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	*Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah (Dokumen)	3	-	1	1	1	-	1	1	1	-	100	100	100
<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	100
<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	Luas lahan pemda tersertifikat (Ha)	2,377	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100

### **Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**

Program ini dirancang oleh Pemerintah untuk memberikan kompensasi yang adil kepada pemilik tanah dan pihak-pihak yang terkena dampak dari proyek pembangunan infrastruktur. Beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam program tersebut adalah pendataan, inventarisasi, konsultasi publik, negosiasi dan kesepakatan, pembayaran ganti kerugian, relokasi dan santunan. Sasaran program ini adalah meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Indikator Persentase luas lahan yang dibebaskan, dengan formulasi luas lahan yang dibebaskan pada tahun n dibagi luas lahan kebutuhan pembangunan Kabupaten pada tahun n dikali 100%. Target triwulan 2 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, didukung 1 kegiatan :

- i. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan sebagai fasilitasi pembebasan tanah. Indikator luas lahan kebutuhan pembangunan Kabupaten pertaahun pada tahun n (m2). Target triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan :
  - a. Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu), aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah yang membutuhkan tanah dengan pelaksanaan perencanaan dengan appraisal untuk menentukan harga tanah. Target triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Pelaksanaan pengadaan tanah Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Desa Wewangriu Kecamatan Malili, yaitu sementara proses kelengkapan berkas untuk pembayaran tahap II.

### **Program Pengelolaan Tanah Kosong**

Program ini dirancang untuk memanfaatkan tanah kosong atau tidak terpakai di daerah agar dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan. Elemen-elemen utama yang dilaksanakan adalah identifikasi, inventarisasi,

pendataan dan pengamanan. Sasaran program ini adalah meningkatnya pengelolaan tanah kosong. Indikator, persentase pengamanan tanah kosong aset Pemerintah Daerah, dengan formulasi jumlah bidang yang dilakukan pengamanan dibagi jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi dikali 100%. Target triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target program ini didukung oleh kegiatan,

- i. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong adalah kegiatan untuk menginventarisasi aset pemda untuk diberikan tanda pengenal dengan patok dan papan pengumuman. Indikator, jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi. Target triwulan 2 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan pemberian patok dan papan pengumuman pada tanah aset Pemda yang telah didata
- a. Subkegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan pemberian patok dan papan pengumuman pada tanah aset Pemda yang telah didata. Target triwulan 2 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan IV. Aksi pada triwulan IV yaitu proses perencanaan administrasi pada aplikasi SIRUP, untuk pelacakan titik persil pengadaan patok dan papan pengumuman.

#### **Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah**

Program ini bertujuan mengatur dan mengelola proses pemberian izin bagi aktivitas pembukaan lahan untuk aset Pemda. Sasaran program ini adalah meningkatnya pengelolaan izin membuka tanah, indikator persentase izin lokasi, formulasi jumlah izin lokasi dibagi permohonan izin lokasi dikali 100%. Target triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target program ini didukung oleh kegiatan,

- i. Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah, adalah izin yang diberikan untuk penentuan lokasi tanah aset Pemda yang akan dimanfaatkan. Indikator,

jumlah dokumen kegiatan Pengendalian pemanfaatan. Target triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target ini didukung oleh subkegiatan,

- a. Subkegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan fasilitasi penentuan lokasi dengan penetapan surat keputusan Bupati untuk tanah aset pemda yang akan dimanfaatkan. Target triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%.

#### **Program Penatagunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini adalah upaya pemerintah untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan lahan secara optimal dan berkelanjutan, sesuai dengan rencana tata ruang dan kebijakan penggunaan lahan. Sasaran program ini adalah meningkatnya penatagunaan tanah. Indikator, persentase luas lahan bersertifikat, dengan formulasi luas lahan bersertifikat dibagi luas wilayah seluruh Kabupaten pada tahun n dikali 100%. Untuk kinerja ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target ini didukung oleh kegiatan,

- i. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota, merujuk pada aktivitas pemanfaatan lahan atau tanah yang seluruh wilayahnya terletak dalam batas administratif Kabupaten. Indikator luas lahan bersertifikat yang difasilitasi. Pencapaian target ini didukung oleh subkegiatan,
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota, aktifitas pada subkegiatan ini adalah fasilitasi persertifikatan aset Pemerintah Daerah, indikator luas lahan bersertifikat yang difasilitasi





## Sasaran Strategis II

Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan

Tabel 17  
Capaian Sasaran II

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai Lakip Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	71,85	0	0

### 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran II memiliki indikator nilai Lakip DPKPP Kabupaten Luwu Timur, yang realisasinya ini diperoleh dari hasil penilaian Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. LAKIP merupakan gambaran kinerja yang dicapai oleh perangkat daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD. Nilai masih menunggu dari Inspektorat.

Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

🚦 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan yang mendukung:

- i. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, subkegiatan yang mendukung:
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, subkegiatan yang mendukung:
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- iii. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- iv. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  - a. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- v. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- vi. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - g. Fasilitas Kunjungan Tamu
  - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- vii. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- viii. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ix. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- ❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu:

  - a. Keterlambatan proses administrasi pengadaan barang dan jasa (e-catalog);

- b. Keterlambatan proses administrasi keuangan;
- c. Kurangnya Sumber Daya Manusia.

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- a. Melakukan koordinasi pejabat pengadaan dan PPK terkait percepatan proses pengadaan barang dan jasa (e-catalog);
- b. Mencermati rekening belanja dalam proses realisasi keuangan;
- c. Percepatan administrasi pertanggungjawaban keuangan;
- d. Melakukan persecuratan ke BKPSDM terkait kebutuhan pegawai.

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran pendukung, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu:

- a. Efisiensi anggaran pada belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada;
- b. Efisiensi belanja internet kantor yaitu biaya wifi kantor, difasilitasi oleh Dinas Kominfo-SP

❖ Efisiensi Sumber Daya

- a. Terdapat jabatan pelaksana yang masih kosong pada lingkup secretariat dan untuk mengakomodir semua pelaksanaan tugas, dilakukan rangkap jabatan sebagai pelaksana harian dan memaksimalkan upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN;
- b. Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan secara berkala untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN

## 2. Perbandingan anatara Target dan Realisasi dengan Sebelumnya

Adapun target dan realisasi dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 18  
Target dan Realisasi Triwulan IV

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja		Target Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Capaian Kinerja Sampai Dengan Triwulan			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		K	Rp									(Realisasi/Target)x 100%			
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100	6.266.892.544	25	25	25	25	25	25	25	25	100	100	100	100
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Target Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	126.317.000	25	25	25	25	25	25	25	0	100	100	100	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	5	60.948.000	1	2	1	1	1	2	1	0	100	100	100	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	2	5.000.000	-	1	-	1	-	1	-	0	-	100	-	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	2	5.000.000	1	-	-	1	1	-	-	0	100	-	-	0

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja		Target Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Capaian Kinerja Sampai Dengan Triwulan			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		K	Rp	(Realisasi/Target)x 100%											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	13	55.369.000	3	3	3	4	3	3	3	0	100	100	100	0
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Realisasi Anggaran (%)	100	4.495.294.144	7	24	29	17	7	24	29	0	100	100	100	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	51	4.429.798.404	21	21	38	51	21	21	38	0	100	100	100	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	65.495.740	4	4	4	6	4	4	4	0	100	100	100	0
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase Aset Teradministrasi (%)	100	20.824.000	25	25	25	25	25	25	25	0	100	100	100	0
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	20.824.000	1	1	1	1	1	1	1	0	100	100	100	0

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja		Target Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Capaian Kinerja Sampai Dengan Triwulan			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		K	Rp	(Realisasi/Target)x 100%											
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)	100	7.155.000	25	25	25	25	25	25	25	0	100	100	100	0
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	4	7.155.000	1	1	1	1	1	1	1	0	100	100	100	0
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Dokumen Kepegawaian Sesuai Standar (%)	100	117.864.800	25	25	25	25	25	25	25	0	100	100	100	0
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	33.668.800	3	3	3	3	3	3	3	0	100	100	100	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	23	84.196.000	5	5	5	8	5	5	5	0	100	100	100	0
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Layanan Administrasi Tepat Waktu (%)	100	589.146.400	25	25	25	25	25	25	25	0	100	100	100	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	5.835.000	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	100	-



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja		Target Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Capaian Kinerja Sampai Dengan Triwulan			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		K	Rp	(Realisasi/Target)x 100%											
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	311.088.100	-	-	3	2	-	-	3	0	-	-	100	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	16.322.900	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	100	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	11.320.000	-	1	1	1	-	1	1	0	-	100	100	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	72	16.320.000	18	18	18	18	18	18	18	0	100	100	100	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.736.000	3	3	3	3	3	3	3	0	100	100	100	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	212.524.400	3	3	3	3	3	3	3	0	100	100	100	0
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Kesesuaian Pengadaan Barang dengan Rencana Kebutuhan (%)	100	129.200.000	25	25	25	25	25	25	25	0	100	100	100	0
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	29	70.200.000	-	-	29	-	-	-	29	-	-	-	100	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja		Target Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Capaian Kinerja Sampai Dengan Triwulan			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		K	Rp	(Realisasi/Target)x 100%											
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	59.000.000	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	100	-
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Penyediaan Jasa sesuai Kebutuhan (%)	100	272.691.200	25	25	25	25	25	25	25	0	100	100	100	0
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	10.261.400	3	3	3	3	3	3	3	0	100	100	100	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	141.949.800	3	3	3	3	3	3	3	0	100	100	100	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	120.480.000	3	3	3	3	3	3	3	0	100	100	100	0
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Dipelihara secara Berkala (%)	100	508.400.000	25	25	25	25	25	25	25	0	100	100	100	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	13	52.150.000	2	3	4	4	2	3	4	0	100	100	100	0

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja		Target Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Capaian Kinerja Sampai Dengan Triwulan			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		K	Rp	(Realisasi/Target)x 100%											
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	67	32.250.000	16	17	17	17	16	17	17	0	100	100	100	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	424.000.000	-	-	-	2	-	-	-	0	-	-	-	0

### 3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan ini dengan Target Jangka Menengah.

Pada triwulan II, yang dapat dibandingkan hanya pencapaian antara kegiatan dan subkegiatan, karena sifatnya dilaksanakan secara rutin.

### 4. Capaian Program Pendukung Sasaran IV

Tabel 19

Capaian Program Pendukung Sasaran IV

No.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUNAN	REALISASI I TAHUNAN	TARGET TRIWULAN		REALISASI TRIWULAN		CAPAIAN TRIWULAN	
					I	II	I	II	I	II
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	25%	25%	25%	25%	100 %	100 %

Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada subbagian perencanaan dan Kepegawaian. Adapun kegiatan dan subkegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah

adalah penyiapan dokumen, melalui tiga tahap penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang saling terkait untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Luwu timur. Indikator kegiatan adalah jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu jumlah. Tahapan target rencana aksi pada triwulan IV, terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan, sehingga capaian 100%. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 4 subkegiatan antara lain :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah proses penyusunan dokumen rencana kerja yang menjadi pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan. Dokumen perencanaan ini dibuat untuk jangka waktu tertentu dan menjadi dasar penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Untuk triwulan IV ditargetkan untuk

- penyusunan Rencana Kerja APBD 2025, dengan rencana aksi pengumpulan data dan informasi kegiatan, melalui tahapan musrembang, identifikasi dan verifikasi usulan kegiatan prioritas, untuk menyusun kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang kemudian akan dituangkan pada dokumen renja APBD 2025.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah proses penyusunan rincian anggaran setelah program dan kegiatan diidentifikasi. Untuk subkegiatan ini ditargetkan pada triwulan IV, pada triwulan IV terlaksana rencana aksi, rincian kebutuhan anggaran berdasarkan jenis belanja, antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal, yang disusun secara rinci dan realitas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
  - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD adalah tahapan lanjutan dari penyusunan RKA-SKPD yang berfokus pada pengesahan dan pelaksanaan anggaran yang telah disetujui. Untuk subkegiatan rencana aksi dan target tahunan ditetapkan pada triwulan III dan IV.
  - d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah proses untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari dampak kinerja perangkat daerah. Rencana aksi pada subkegiatan ini, meliputi pengumpulan data, analisis dan penilaian berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** adalah penataan keuangan, pencatatan, pengeluaran dan pemasukan melalui tiga tahap penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang saling terkait untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Luwu timur. Indikator kegiatan adalah tersedianya gaji dan tunjangan, laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun tepat waktu . Tahapan target rencana aksi pada triwulan IV, terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan, sehingga capaian 100%. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 2 subkegiatan antara lain :
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan adalah besaran anggaran yang dibayarkan kepada PNS berupa gaji pokok dan tunjangan yang menjadi pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan. Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ini dibuat untuk memastikan bahwa pegawai mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku dan menjadi dasar penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Untuk triwulan IV ditargetkan untuk penyusunan Rencana Kerja APBD 2026 dan APBD-P 2025, dengan rencana aksi pengumpulan data penambahan pegawai untuk menyusun kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang kemudian akan dituangkan pada dokumen renja APBD 2026 dan APBD-P 2025.

- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD adalah proses penyusunan laporan keuangan SKPD berupa laporan realisasi keuangan, neraca, dan catatan atas laporan keuangan SKPD. Untuk subkegiatan ini ditargetkan pada triwulan IV, yang terlaksana rencana aksi, rincian kebutuhan anggaran berdasarkan jenis belanja, antara lain belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan, belanja alat tulis kantor, belanja kertas dan cover, belanja bahan cetak, belanja bahan komputer, belanja makan minum rapat dan belanja perjalanan dinas, yang disusun secara rinci dan realitas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, untuk APBD 2026 dan APBD-P 2025.

**2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum barang dilingkup DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Indikator kegiatan adalah persentase barang milik daerah yang ditatausahakan. Tahapan target rencana aksi pada kegiatan ini adalah Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan pada DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 1 subkegiatan antara lain :

- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan

pada subkegiatan ini adalah rincian kebutuhan anggaran berdasarkan jenis belanja, antara lain belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan, belanja kertas dan cover dan belanja cetak.

**3. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** adalah proses pengumpulan data penghuni yang ada pada rusunawa sumasang, rusunawa ASN dan memastikan bahwa data yang terkumpul akurat dan lengkap. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah melakukan pendataan ulang penghuni rusunawa sumasang dan rusunawa ASN. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 1 subkegiatan antara lain :

a .Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah adalah proses perhitungan jumlah retribusi. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan, belanja alat tulis kantor, belanja kertas dan cover, belanja bahan cetak dan belanja bahan computer

**4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** adalah proses dan tugas yang berkaitan dengan manajemen dan pengelolaan administrasi pegawai dilingkup DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Indikator kegiatan adalah persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah. Tahapan target rencana aksi pada kegiatan ini adalah mengidentifikasi kebutuhan administrasi yang dibutuhkan pegawai serta menganalisis jabatan dan beban kerja pada DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 2 subkegiatan antara lain :

b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah proses mengumpulkan informasi pegawai dan memastikan bahwa data yang terkumpul akurat dan lengkap. Rencana aksi pada triwulan IV (empat) yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah pengolahan administrasi pegawai antara lain administrasi gaji dan tunjangan berupa pembuatan Kenaikan gaji berkala, pengelolaan cuti dan presensi serta sosialisasi dan pendampingan pengisian aplikasi E-Kinerja untuk periode Januari sampai dengan Desember 2025.

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan adalah salah peningkatan kapasitas SDM yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang

komprehensif mengenai tugas dan fungsi. Rencana aksi yang dilakukan pada triwulan I adalah pengusulan ASN untuk mengikuti beberapa diklat/bimbingan teknis yang berkaitan dengan tugas secara teknis.

**5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** adalah proses pencatatan, pembukuan, surat menyurat, kearsipan, dan lain sebagainya. Indikator kegiatan adalah persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah. Tahapan target rencana aksi pada kegiatan ini adalah mengidentifikasi kebutuhan administrasi komponen instalasi Listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, kebutuhan logistic, kebutuhan barang cetak dan penggandaan, bahan bacaan, fasilitasi kunjungan tamu. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 8 subkegiatan antara lain :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah kegiatan yang menyediakan peralatan dan alat-alat yang mendukung penerangan bangunan. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja peralatan listrik
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah proses pencatatan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kelancaran pekerjaan dan kelancaran administrasi. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja modal peralatan studio video dan film
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah kegiatan untuk menyediakan peralatan yang dibutuhkan sebagai sarana penunjang. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja modal alat rumah tangga lainnya atau belanja rumah tangga aluminium
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah proses pencatatan kebutuhan bahan logistic. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja BBM dan belanja bahan-bahan lainnya.
- e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah menyediakan barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja bahan cetak
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan adalah



kegiatan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan wawasan mengenai berita yang sedang beredar .Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah

- g. Fasilitas Kunjungan Tamu adalah kegiatan yang menyediakan kebutuhan makan dan minum untuk tamu. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja makanan dan snack tamu.
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah kegiatan yang meliputi penyelenggaraan rapat koordinasi dan perjalanan dinas. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi rapat koordinasi dan perjalanan dinas, memastikan kegiatan administrasi perkantoran dapat berjalan efektif dan efisien, meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, membantu koordinasi dengan instansi terkait. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah mengetahui jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dina luar daerah.

**6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** adalah penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan tersedianya jasa pelayanan umum kantor agar dapat meningkatkan kinerja petugas pelayanan kantor dalam melaksanakan pekerjaan kantor. Indikator kegiatan adalah persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah. Tahapan target rencana aksi pada kegiatan ini adalah laporan penyediaan jasa surat menyurat, laporan penyediaan jasa komunikasi,SDA dan Listrik, laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakn. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 3 subkegiatan antara lain :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah pencatatan administrasi surat masuk dan surat keluar. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah mengetahui jumlah surat masuk dan surat keluar dan belanja ATK yang dibutuhkan.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik adalah proses pendataan kebutuhan air dan Listrik. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja air dan Listrik.
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah proses pendataan tenaga

upahjasa pada DPKK. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa, belanja jasa tenaga administrasi, belanja jasa tenaga kebersihan, belanja jasa tenaga keamanan, belanja jasa tenaga supir.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah adalah kegiatan untuk menjaga dan mempertahankan kondisi fisik bangunan, peralatan, dan mesin yang mendukung urusan pemerintah daerah. Indikator kegiatan adalah persentase BMD yang layak fungsi. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 3 subkegiatan antara lain :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah proses pendataan kendaraan dinas yang layak fungsi. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah jumlah kendaraan yang dipelihara.
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah mencakup pemeliharaan layanan terjadwal secara berkala, pemeriksaan rutin, dan perbaikan terjadwal maupun darurat. Perawatan ini juga mencakup penggantian atau penyelarasan ulang komponen yang aus, rusak, atau tidak selaras. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja pemeliharaan print, laptop, AC, mesin babat.
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah untuk menjaga kelayakan fungsi bangunan gedung dan prasarannya. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah pemeliharaan Gedung kantor

### 3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran pada APBD-P 2025 DPKPP Kabupaten Luwu Timur sebesar RP. 45.877.483.516,- (Empat Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh JUTA Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah), terealisasi sebesar Rp. 35.380.167.091 (Tiga Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh JUTA Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Satu Rupih) persentase sebesar 77,12%. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20

Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4=3/2 *100
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	6.266.892.544	4.565.633.591	72,85%
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	126.317.000	108.540.365	85,93%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.948.000	51.466.988	84,44%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	3.115.770	62,32%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	4.254.630	85,09%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.369.000	49.702.977	89,77%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	4.495.294.144	3.011.910.593	67,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.429.798.404	2.951.062.891	66,62%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	65.495.740	60.847.702	92,90%
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	20.824.000	17.060.000	81,92%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.824.000	17.060.000	81,92%
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	7.155.000	6.840.000	95,60%
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	7.155.000	6.840.000	95,60%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	117.864.800	69.850.793	59,26%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33.668.800	26.989.682	80,16%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	84.196.000	42.861.111	50,91%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	589.146.400	578.242.307	98,15%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.835.000	4.208.000	72,12%

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4=3/2 *100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	311.088.100	307.980.600	99,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.322.900	15.842.900	97,06%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.320.000	10.924.000	96,50%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.320.000	15.820.000	96,94%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.736.000	11.812.000	75,06%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.524.400	211.654.807	99,59%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	129.200.000	107.214.900	82,98%
Pengadaan Mebel	70.200.000	65.379.000	93,13%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.000.000	41.835.900	70,91%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	272.691.200	177.085.271	64,94%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.261.400	9.688.533	94,42%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141.949.800	77.576.738	54,65%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.480.000	89.820.000	74,55%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	508.400.000	488.889.362	96,16%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.150.000	48.160.072	92,35%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.250.000	25.654.000	79,55%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	424.000.000	415.075.290	97,90%
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	2.160.931.490	1.423.100.024	65,86%
<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	282.099.900	266.879.967	94,60%
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	23.199.000	22.485.233	96,92%
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	258.900.900	244.394.734	94,40%
<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	400.000.000	-	0,00%
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	200.000.000	-	0,00%
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	200.000.000	-	0,00%
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-	0,00%

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4=3/2 *100
<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	1.464.593.340	1.142.869.551	78,03%
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.464.593.340	1.142.869.551	78,03%
<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	14.238.250	13.350.506	93,77%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	14.238.250	13.350.506	93,77%
<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	8.102.221.747	7.860.460.734	97,02%
<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	64.740.500	58.104.905	89,75%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	64.740.500	58.104.905	89,75%
<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	469.825.000	396.430.558	84,38%
Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	469.825.000	396.430.558	84,38%
<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	7.567.656.247	7.405.925.271	97,86%
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.196.732.000	2.191.135.830	99,75%
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	5.370.924.247	5.214.789.441	97,09%
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	19.983.745.735	19.410.768.546	97,13%
<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	19.983.745.735	19.410.768.546	97,13%
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	19.983.745.735	19.410.768.546	97,13%
<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	3.889.900	2.435.378	62,61%
<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	3.889.900	2.435.378	62,61%
Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.889.900	2.435.378	62,61%
<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	9.188.913.950	1.964.902.736	21,38%
<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	9.188.913.950	1.964.902.736	21,38%
Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.188.913.950	1.964.902.736	21,38%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	115.982.500	104.025.238	89,69%
<b>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>	115.982.500	104.025.238	89,69%
Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong			89,69%

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4=3/2 *100
	115.982.500	104.025.238	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	4.844.350	3.070.970	63,39%
<b>Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>	4.844.350	3.070.970	63,39%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	4.844.350	3.070.970	63,39%
<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	50.061.300	45.769.874	91,43%
<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	50.061.300	45.769.874	91,43%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	50.061.300	45.769.874	91,43%
<b>JUMLAH</b>	<b>45.877.483.516</b>	<b>35.380.167.091</b>	<b>77,12</b>

#### BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan IV Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DPKPP Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh DPKPP Kabupaten Luwu Timur triwulan IV Tahun 2025.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan laporan pada triwulan yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Evaluasi Triwulan IV Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan pada tiwulan selanjutnya.

Malili, 31 Desember 2025

**KEPALA DINAS,**



**Drs. H. BAHRI SULI, MM**

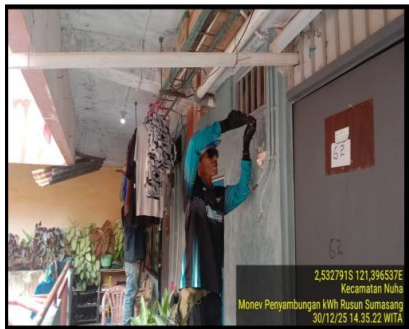
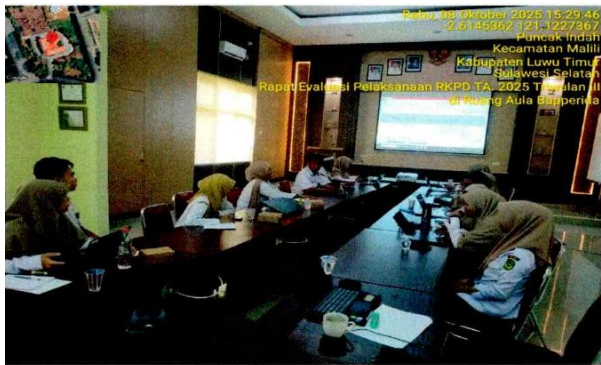
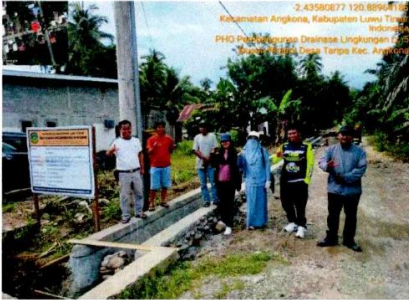
Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 196606201986031007



Lampiran  
Dokumentasi Pendukung Sasaran I

Lampiran  
Dokumentasi Pendukung



KAB. LUWU TIMUR							
NO	BIDANG	STATUS 2025 (TW 1)	STATUS 2025 (TW 2)	STATUS 2025 (TW 3)	STATUS 2025 (TW 4)	AKSI 2023 (TW 4)	AKSI 2024 (TW 4)
1	PENDIDIKAN	Sudah Melakukan Input (93.75 %)	Sudah Melakukan Input (93.75 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	2023	2024
2	KESIHATAN	Sudah Melakukan Input (88.40 %)	Sudah Melakukan Input (88.95 %)	Sudah Melakukan Input (95.58 %)	Sudah Melakukan Input (96.69 %)	2023	2024
3	PEKERJAAN UMUM	Sudah Melakukan Input (70.00 %)	Sudah Melakukan Input (70.00 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	2023	2024
4	PERUMAHAN RAKYAT	Sudah Melakukan Input (85.71 %)	Sudah Melakukan Input (92.31 %)	Sudah Melakukan Input (92.31 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	2023	2024
5	TRANSTBULIMNAS	Sudah Melakukan Input (75.00 %)	Sudah Melakukan Input (81.00 %)	Sudah Melakukan Input (84.00 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	2023	2024
6	SOSIAL	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	Sudah Melakukan Input (96.67 %)	2023	2024



## Dokumentasi Sasaran II

### 1. Permohonan pengembalian Hak-hak masyarakat yang di klaim oleh PTPN (Persero) Unit Kebun Malili



### 2. Penyamaan Persepsi dan pandangan terhadap wilayah konsesi/kontrak Karya/IUP – K PT.Vale Ind, Tbk.



## Dokumentasi Sasaran II

### 1. Rapat Evaluasi TW IV Tahun 2025





## 2. Rapat Pembahasan RENSTRA 2026-2029

